

GAMBARAN, PENGARUH, DAN KEDUDUKAN DEMOKRASI INDONESIA DI ERA MODERN DALAM SUDUT PANDANG MASYARAKAT

Dany Try Utama Hutabarat^{1*}, Nurhaliza Rambe², Erra Ayu³, Pandu Andrian⁴,
Fikri Ersu⁵, Dicky Arya⁶, Cecep Sujati⁷, Muhammad Bintang⁸, Ilham Arya⁹,
Juheri Amri¹⁰, Gilang Opri¹¹, Nanda Pratama¹², Iqbal Irawan¹³

¹⁻¹³Universitas Asahan

*E-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

Abstract

The current study of democracy has been discussed in various book and journal studies. Not only that, democracy is also a topic of ideas that are always interesting to explore. The public's perspective on Indonesian democracy in the modern era, including its image, influence, and position, is just as important to examine. The study of looking for a figure of Indonesian democracy has never been completed. Democracy is not new but has gone through a long process, even considered as a form of government. Because of the large role of democracy in the structure of the state, education about Indonesian democracy is made. Democracy can also be seen as a phenomenon of power in a state institution in the political field where the greatest power is in the hands of the people. Hence, from the people's point of view, the position and influence of Indonesian democracy is one thing we know that democracy has a very important position and influence in the life of the nation and state.

Keywords: Position, Democracy, People, State, Modern Era

Abstrak

Kajian mengenai demokrasi yang dewasa ini telah dibahas dalam berbagai kajian buku dan jurnal. Tak hanya itu demokrasi juga menjadi topik gagasan yang selalu menarik untuk diulik habis. Kajian tentang gambaran, pengaruh, dan kedudukan demokrasi Indonesia di era modern dalam sudut pandang masyarakat tak kalah pentingnya untuk dibahas. Studi mencari sosok demokrasi Indonesia tidak pernah selesai. Demokrasi bukan hal baru melainkan telah melalui proses panjang, bahkan dinilai sebagai salah satu bentuk pemerintahan. Besarnya peranan demokrasi terhadap tatanan Negara maka dibuatlah pendidikan tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi juga dapat dipandang sebagai sebuah fenomena kekuasaan dalam suatu institusi negara di bidang politik dimana kekuasaan terbesar berada ditangan rakyat, Jadi, dalam sudut pandang masyarakat kedudukan gambaran serta pengaruh demokrasi Indonesia adalah Satu hal yang kita ketahui bahwa demokrasi memiliki kedudukan dan pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: Kedudukan, Demokrasi, Rakyat, Negara, Era Modern

¹Universitas Asahan

Dany Try Utama Hutabarat

*E-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi berasal dari kata “*demos*” dan “*kratos*” atau “*kratein*”. *Demos* artinya rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Sehingga, secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi juga dapat dipandang sebagai sebuah fenomena kekuasaan dalam suatu institusi negara di bidang politik dimana kekuasaan terbesar berada ditangan rakyat, pengaruh demokrasi di era modern sekarang sangatlah banyak terutama dikalangan mahasiswa (Harefa & Fatolosa Hulu, 2020; Mochtar, 2011). Demokrasi merupakan produk dari perubahan bentuk pemerintahan yang dimulai dari monarki, kemudian berubah menjadi tirani. Dikarenakan besarnya peranan demokrasi terhadap tatanan Negara maka dibuatlah pendidikan tentang demokrasi Indonesia. Pendidikan demokrasi tidak hanya urgen bagi negara-negara yang sedang berada dalam transisi menuju demokrasi seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara- negara yang telah mapan demokrasinya.

Kajian mengenai demokrasi yang dewasa ini telah dibahas dalam berbagai kajian buku dan jurnal. Tak hanya itu demokrasi juga menjadi topic gagasan yang selalu menarik untuk diulik habis mulai jenjang SD, SMP, SMA, bahkan hingga ke Perguruan Tinggi. Terlihat dengan diterapkannya pemilu raya sebagai perwujudan demokrasi dalam jenjang Perguruan tinggi, hal ini dapat mendasari bibit-bibit awal dari demokrasi suatu Negara. Untuk melihat tingkat kehidupan demokratis suatu negara, tergantung pada budaya politiknya. Budaya politik merupakan variabel determinan atau berpengaruh terhadap sistem politik. Adakah masyarakat Indonesia memiliki potensi budaya politik yang kondusif bagi berkembangnya sistem demokrasi? Pertanyaan ini kiranya menarik untuk dikaji kembali sehubungan dengan berkembangnya tuntutan demokratisasi yang kini sedang marak sejak keruntuhan rezim Orde Baru di Indonesia.

Namun, kajian tentang gambaran, pengaruh, dan kedudukan demokrasi indonesia di era modern dalam sudut pandang masyarakat tak kalah pentingnya untuk dibahas. Sebagai mana yang kita tahu bahwa Demokrasi sendiri memiliki arti bahwa Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Hal ini berarti kajian tentang demokrasi ini berkenaan langsung dengan masyarakat dimana didalamnya termasuk juga pelajar, mahasiswa, lembaga pemerintahan serta seluruh warga Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Kebangsaan yang bangsanya dulu terlahir baru membentuk negaranya kemudian, telah menetapkan prinsip musyawarah, mufakat, perwakilan sebagai landasan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia untuk tegaknya kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Sementara demokrasi yang terbangun dari Barat sebagai sistem negara demokrasi tidak sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia.

Studi mencari sosok demokrasi Indonesia tidak pernah selesai. Alasannya karena sejarah demokrasi seperti dipahami di Eropa dan Amerika tidak memiliki akar mendalam dalam bumi Indonesia sejak dahulu. Apalagi dibandingkan selama 76 tahun sejak kemerdekaan, demokrasi Indonesia malah melakukan lompatan besar sejak dimulainya reformasi pada tahun 1998, dibandingkan dengan pemerintahan otoriter Soeharto (Orde Baru) dari tahun 1966 hingga 21 Mei 1998, dan selama pemerintahan Soekarno dari kemerdekaan negara pada tahun 1945 hingga 1966.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif (*legal research*) dikatakan demikian, karena fokus penelitian ini adalah gagasan atau konsep, dalam konteks ini yang dimaksud adalah bagaimana hubungan negara, agama dan warga negara dalam negara Pancasila (Syamsuddin, 2019).

Pendekatan hukum normatif tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Bahan hukum primer (*primary law material*) berupa bahan hukum yang mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang memunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti konvensi dan dokumen hukum yang berhubungan dengan hubungan negara dengan agama. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari referensi hukum dan nonhukum berupa hasil-hasil penelitian, literatur hukum yang mendukung permasalahan; dan Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui pemanfaatan kamus, ensiklopedia yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki Mahmud, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Demokrasi

Demokrasi bukan hal baru melainkan telah melalui proses panjang, bahkan dinilai sebagai salah satu bentuk pemerintahan. Menurut Aristoteles, demokrasi merupakan produk dari perubahan bentuk pemerintahan yang dimulai dari monarki, kemudian berubah menjadi tirani. Dari tirani berubah menjadi aristokrasi, kemudian oligarki. Oligarki digantikan oleh polity, yang kemudian menjadi demokrasi (Yumitro, 2013).

Dalam hal ini, Aristoteles percaya bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah monarki, aristokrasi, dan polity. Sementara demokrasi, sama halnya dengan pemerintahan tirani dan oligarki, tidak lagi memperhatikan *equality* dalam partisipasi politik dan pengambilan kebijakan (Grigsby, 2014). Singkatnya, demokrasi merupakan produk gagal dari tesis dan antitesis bentuk pemerintahan sebelumnya.

Secara istilah, demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos* atau *kratein*. *Demos* artinya rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Sehingga, secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai implikasinya, diharapkan muncul “*political equality* (kesetaraan politik), popular participation (partisipasi populer), dan *rule in the public interest* (memerintah untuk kepentingan umum)” (Diamond & Morlino, 2004; Fatke, 2015). Pada awalnya, demokrasi langsung menjadi gambaran penentangan masyarakat terhadap sistem otoriter dalam pemerintahan, dengan menerapkan sistem mass meeting.

Perkembangan Indonesia menuju demokrasi dalam beberapa tahun terakhir ini agaknya tidak mungkin lagi dimundurkan (*point of no return*) (Tutik, 2017). Perubahan Indonesia menuju demokrasi jelas sangat dramatis; dan Indonesia muial disebut-sebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar. Perubahan Indonesia menuju demokrasi tidak bisa lain mengikuti kecenderungan pertumbuhan dramatis demokrasi pada tingkat internasional secara keseluruhan. Indonesia pada akhirnya mengikuti apa yang disebut banyak ahli sebagai “*third wave of democracy*” (Culla, 2005).

Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik Indonesia belakangan ini, sebagian besarnya bersumber dari konflik di antara elite politik yang tidak kunjung terselesaikan sampai saat ini. Jika salah satu esensi demokrasi

dan politik adalah “*art of compromise*” dan respek terhadap perbedaan sikap politik, orang justru menyaksikan kian meningkatnya sikap pokok pada kalangan elit politik dan massa. Lebih cecika lagi, sikap-sikap seperti itu kemudian diberi legitimasi keagamaan dan teologis oleh kalangan ulama, sehingga potensi kekerasan yang mengancam demokrasi semakin menguat lagi.

Demokrasi berhubungan erat dengan demokratisasi. Demokratisasi adalah sebuah proses politik yang dijalankan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk menciptakan kehidupan politik yang demokratis. Dalam konteks itu, berlangsungnya demokratisasi penting untuk dilihat dengan mengacu kepada dua hal utama yang menjadi dasar demokrasi. Pertama, adanya seperangkat ketentuan normatif (kriteria nilai-nilai) yang harus terpenuhi di dalam masyarakat. Kedua, adanya suatu struktur politik yang berkembang dalam masyarakat bersangkutan yang memenuhi ketentuan normatif tersebut. Demokratisasi pada hakikatnya merupakan suatu proses perubahan politik (*political change*) dari keadaan yang dianggap lebih kurang demokratis.

Adanya gambaran perwujudan sifat demokratis atau tidak dari budaya politik yang berkembang di dalam suatu masyarakat, dengan demikian tidak hanya dapat dilihat dari interaksi antar individu dengan sistem politiknya, tetapi juga interaksi antar individu dalam konteks kelompok atau golongan dengan kelompok dan golongan sosial lainnya (Culla, 2005).

Demokrasi dan Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia umumnya termasuk elit politik yang mengklaim sebagai “pejuang demokrasi” memiliki hanya sedikit pengalaman demokrasi yang benar-benar otentik. Walaupun Indonesia dulu pernah menerapkan “Demokrasi Terpimpin” di masa Presiden Soekarno, dan “Demokrasi Pancasila” pada masa Presiden Soeharto, maka pada praktiknya, semua itu agaknya tidak lebih daripada sekadar “pseudo-demokrasi” atau “quasi-demokrasi”.

Mengalami demokrasi (*experiencing democracy*), dengan demikian, merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia umumnya. Karena itu, mengalami demokrasi, kalau perlu akan melibatkan proses “trial and error” sering diulang-ulang Nurchoilsh Madjid. Pada batas tertentu, argumen Nurchoilsh Madjid tentang “*trial and error*” atas demokrasi bisa dipahami.

Ketika membangun NKRI, para bapak pendiri bangsa Indonesia berpandangan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat, karena Indonesia memiliki sistem musyawarah yang merupakan jatidirinya rakyat Indonesia yang telah hidup, tumbuh dan berkembang sejak dahulu di dalam setiap adat istiadatnya masyarakat Indonesia. Seperti Bung Karno menjelaskan mengenai musyawarah tidak hanya pada saat pidato tanggal 01 Juni 1945 di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), akan tetapi juga dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 30 September 1960 (Hanafi, 2013).

Namun demikian, perkembangan yang terjadi hari ini, teori-teori yang diajarkan pada universitas-universitas yang mengajarkan ilmu politik dan ketatanegaraan, terkait pengkajian mengenai musyawarah dan demokrasi, seolah-olah belum pernah terjadi di Indonesia, dan fenomena ini hampir menyeluruh di dalam dunia pendidikan Indonesia. Sehingga sangat diwajarkan apabila masih sedikitnya pemikiran yang bermunculan dalam membahas pelaksanaan musyawarah yang sudah jelas memiliki dasar hukum di dalam Pancasila dan UUD1945. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai Bangsa Indonesia masih buta terhadap sejarah perjuangan terbangunnya NKRI, di mana seluruh perjuangan dalam setiap momentum bersejarah terbangunnya NKRI merupakan produk dari musyawarah mufakat.

Menurut Muhammad Hanafi (2013) kebangsaan bukan negara demokrasi yang hanya satu-satunya di dunia memiliki konstruksi bangsanya dulu terlahir baru membentuk negaranya kemudian dengan satu cita-cita untuk mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli (kedaulatan rakyat Indonesia).

Cara pikir yang sama untuk Demokrasi atau Kerakyatan sebagai asas yang dianut oleh semua negara yang baru merdeka sebagai ukuran seberapa jauh suatu negara sudah melepaskan diri dari ancient regime yang tegak berdiri di atas feodalisme dan dari kolonialisme yang ditopang oleh imperialism (Samosir & Mali, 2021).

Adapun perdebatan serius di kalangan para Bapa Pendiri Bangsa apakah Indonesia sebenarnya memiliki tradisi demokrasi sehingga layak memilih system pemerintahan demokratis seperti Amerika atau Eropa, atau sesungguhnya tradisi politik Indonesia justru menganut sistem kerajaan. Sebab fakta-fakta lapangan termasuk hingga saat ini masih ditemukan sejumlah kerajaan-kerajaan yang hingga di era modern dewasa ini yang muncul dan diakui pemerintah sebagai kerajaan yang sah. Paham demokrasi di Indonesia saat ini tidak berbeda dengan paham demokrasi yang dimengerti di seluruh dunia. Menurut Robert Dahl

(dalam (Supardan, 2015)), prinsip demokrasi harus mencakup setidaknya enam kriteria, yaitu: 1) kontrol atas keputusan pemerintah yakni kehadiran warga negara dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil para pejabat dan lembaga negara; 2) pemilihan yang teliti dan jujur dalam proses pemilihan umum dengan konteks pelibatan semua pihak yang hadir dalam penyelenggaraan pemilu; 3) hak memilih dan dipilih bagi setiap warga negara tanpa kecuali sesuai dengan yang dipersyaratkan; 4) kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman bagi setiap warga negara; 5) kebebasan mengakses informasi yang dibutuhkan oleh publik; 6) kebebasan berserikat terhadap warga negara tanpa ada tekanan dan pengecualian .

Kemudian dikarenakan besarnya peranan demokrasi terhadap tatanan Negara maka dibuatlah pendidikan tentang demokrasi Indonesia. Pendidikan demokrasi singkatnya secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktek demokrasi melalui pendidikan.

Pendidikan demokrasi tidak hanya urgen bagi negara-negara yang sedang berada dalam transisi menuju demokrasi seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara- negara yang telah mapan demokrasinya. Penumbuhan dan pengembangan *civic culture* dapat dikatakan merupakan salah satu tujuan penting pendidikan kewarganegaran (*civic education*). Tetapi harus segera diakui, sementara para ahli pendidikan kewargaan umumnya sepakat bahwa peranan pendidikan kewargaan dalam pengembangan demokrasi dan kewargaan demokratis telah Jelas, tetapi dalam prakteknya masih terdapat perbedaan- perbedaan (Azra, 2005).

Harus diakui, pendidikan kewargaan yang semakin menemukan momentum pada 1990an dipahami secara berbeda- beda. Bagi sebagian ahli, pendidikan kewargaan diidentikkan dengan "pendidikan demokrasi" (*democracy education*).

Demokrasi Indonesia di Era Modern

Demokrasi juga dapat dipandang sebagai sebuah fenomena kekuasaan dalam suatu institusi negara di bidang politik dimana kekuasaan terbesar berada ditangan rakyat, pengaruh demokrasi di era modern sekarang sangatlah banyak terutama dikalangan mahasiswa contohnya aktifnya mahasiswa dalam melakukan aksi demo sebagai perwujudan protes, musyawarah sebagai cara penyelesaian masalah dengan damai dan lainnya. Namun, kurangnya perwujudan demokrasi ini menimbulkan kalimat bahwa adanya hukum yang "tumpul diatas". Sehingga terbentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan misalnya pemuda pancasila, ikatan pemuda karya, karang taruna, GMPEKAT IB, Dll.

Pada saat ini juga, masyarakat mudah terpengaruh dengan berita-berita yg belum tentu itu benar maka dari itu masyarakat sering demokrasi tanpa mencari permasalahan nya dulu, kebanyakan ikut-ikutan dan mudah di pengaruhi, tanpa tahu isu apa yang sedang berkembang di masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa saat ini demokrasi itu tidak terealisasi dengan baik di tangan rakyat demokrasi itu masih di pegang oleh oknum yg berwenang tinggi. Misalnya lembaga perwakilan yang seharusnya dibuat untuk mendengar keluhan kesah masyarakat pada kenyataan nya banyak yang “tidur”. Kurangnya respon dari lembaga terkait ini seharusnya dapat mewakili suara rakyat dan menyelesaikan isu-isu yang berkembang demi kepentingan rakyat (sebagaimana prinsip dasar demokrasi).

Berbagai organisasi yang mengatas namakan kedudukan demokrasi dalam hal ini organisasi tersebut menjadi tameng terdepan dalam menyuarakan suara rakyat Contohnya seperti aksi demo yang dilakukan baru-baru Ini di kantor DPRD. Masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada petinggi Negara. Karena seharusnya rakyatlah yang menjadi kepentingan utama dalam dibentuknya suatu keputusan namun nyatanya tidak. Seharusnya masyarakat bebas dalam menentukan pendapat, menentukan arah pandangan hidup, dan berhak ikut serta dalam perumusan maupun pengembangan hukum (Hutabarat, Fransisca, et al., 2022).

Oleh karena itu, dalam sudut pandang masyarakat kedudukan gambaran serta pengaruh demokrasi Indonesia adalah Satu hal yang kita ketahui bahwa demokrasi memiliki kedudukan dan pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Kerena dalam kehidupan masyarakat demokrasi sangat mendukung terciptanya kehidupan bersama dalam masyarakat dengan nyaman,.

Bangsa Indonesia sendiri telah mencoba menerapkan bermacam macam demokrasi dan juga menerapkan serta membuktikan pengaruh penting nya demokrasi dalam masyarakat. Contoh nya adalah masalah masalah yang di hadapi di musyawarah kan bersama, lalu keputusan keputusan di ambil melalui kesepakatan bersama inilah bentuk Penting dan pengaruh Demokrasi bagi masyarakat, Serta kedudukan demokrasi dalam masyarakat (Hutabarat, Salam, et al., 2022).

Adapun gambaran pentingnya demokrasi antara lain adalah:

- 1) Dengan adanya demokrasi maka masyarakat berperan terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih;
- 2) Budaya demokrasi dapat menghindari tindak sewenang-wenang terhadap warganegara karena Negara demokrasi mengakui supremasi hukum;
- 3) Negara dengan praktik pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Dahulu, tidak sedikit penguasa yang cenderung bertindak otoriter, diktator, membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat dan lain-lain karena para pengusaha sering merasa terganggu kekuasaannya. Ketidakmampuan melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat membuat para pengusaha bersikap demikian;
- 4) Memungkinkan satiap kebudayaan berkembang baik karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi.

KESIMPULAN

Cara pikir yang sama untuk Demokrasi atau Kerakyatan sebagai asas yang dianut oleh semua negara yang baru merdeka sebagai ukuran seberapa jauh suatu negara sudah melepaskan diri dari ancient regime yang tegak berdiri di atas feodalisme dan dari kolonialisme yang ditopang oleh imperialisme.

Bangsa Indonesia sendiri telah mencoba menerapkan bermacam macam demokrasi dan juga menerapkan serta membuktikan pengaruh penting nya demokrasi dalam masyarakat. Dengan adanya demokrasi maka masyarakat berperan terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2005). Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia. *Unisia*, 57, 219–225.
- Culla, A. S. (2005). Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia. *Sociae Polites*, 5(23), 68–79.
- Diamond, L., & Morlino, L. (2004). The quality of democracy: An overview. *Journal of Democracy*, 15(4), 20–31.
- Fatke, M. (2015). Participation and political equality in direct democracy: Educative effect or social bias. *Swiss Political Science Review*, 21(1), 99–118.
- Grigsby, E. (2014). *Cengage Advantage Books: Analyzing Politics*. Cengage Learning.
- Hanafi, M. (2013). *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*. Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta.

- Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. PM Publisher.
- Hutabarat, D. T. H., Fransisca, Z., Ritonga, F., Pardede, D. J., Almas, S., Sikumbang, N. A., Mutiara, Khoiriyah, A., Hamizah, S., Malahayati, & Suryadi. (2022). Understanding And Describing Relationship Of State Law And Human Right. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)*, 1(1), 65–72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.63>
- Hutabarat, D. T. H., Salam, A., Zuwandana, A., al Azmi, C., Wijaya, C. R., Darnita, Tania, I., Lubis, L. K. A., Sitorus, M. A. P., Adawiyah, R., & Sinaga, R. (2022). Analysis Of The Implementation Of Law In Every Level Of Society In Indonesia. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI)*, 1(2), 9–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55047/polri.v1i2.80>
- Marzuki Mahmud, P. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. *Jakarta: Kencana*.
- Mochtar, H. (2011). *Demokrasi dan politik lokal di kota santri*. Universitas Brawijaya Press.
- Samosir, O., & Mali, F. X. (2021). *Mencari Sosok Demokrasi Indonesia: Studi Ideologi Pancasila menuju Pemilu Serentak Tahun 2024*.
- Supardan, D. (2015). Sejarah dan prospek demokrasi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 125–135.
- Syamsuddin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Tutik, T. T. (2017). *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Prenadamedia Group.
- Yumitro, G. (2013). Partai Islam dalam dinamika demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(1), 35–50.